

## Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis *Collaborative Governance* di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan

### Implementation Of Collaborative Governance Based Waste Management Program in Kediren Village, Lamongan Regency

Atha Badi'ah Mahrusah Prasetyani <sup>1</sup>, Prasetyo Isbandono <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email <sup>1</sup>: [atha.21052@mhs.unesa.ac.id](mailto:atha.21052@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email <sup>2</sup>: [prasetyoisbandono@unesa.ac.id](mailto:prasetyoisbandono@unesa.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance* antara pihak Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, PKK, serta WEHASTA. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi delapan aspek dalam *collaborative governance* menurut DeSeve dalam Sudarmo (2015). Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut, **Struktur Jaringan** memiliki tantangan yaitu adanya ketidakseimbangan kapasitas, terutama pada organisasi pemuda (Karang Taruna). **Komitmen Bersama Terhadap Tujuan** ditemukan fenomena menurunnya komitmen, partisipasi aktif mulai berkurang. **Kepercayaan di antara Partisipan** terdapat kebutuhan memperjelas peran, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. **Tata Kelola** memiliki kendala yaitu keterbatasan forum partisipasi masyarakat. **Akses Kewenangan** dalam program pengelolaan sampah masih belum adanya SOP. **Distribusi Tanggung Jawab** kurang jelas. **Berbagi Informasi** masih perlu ditingkatkan agar seluruh pihak dapat memperoleh informasi yang akurat. **Akses kepada Sumber Daya** masih terbatas dalam hal pendanaan dan tenaga terampil yang memadai. **Struktur Jaringan** dapat ditingkatkan dengan melibatkan pemuda melalui kegiatan menarik seperti lomba video edukatif. **Komitmen Bersama terhadap Tujuan** dalam program pengelolaan sampah dapat disusun kesepakatan formal seperti MoU, dan memberikan penghargaan. **Kepercayaan di antara Partisipan** dapat membentuk forum transparansi kolaborasi, menyusun serta menyosialisasikan peran dan tanggung jawab tiap aktor. **Tata Kelola** dapat membentuk Forum Warga Peduli Sampah. **Akses Kewenangan** dapat menyusun SOP terpadu pengelolaan sampah untuk seluruh aktor. **Distribusi Tanggung Jawab** dapat menyusun peta peran. **Berbagi Informasi** dapat membangun sistem komunikasi terpadu, seperti grup *WhatsApp* dan papan informasi. **Akses kepada Sumber Daya** pada program pengelolaan sampah dapat melakukan regenerasi tim Bank Sampah dan menetapkan skema iuran sukarela warga.

**Kata Kunci:** Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Tata Kelola

#### Abstract

The abstract This study aims to describe how the implementation of a collaborative governance-based waste management program between the Environmental Service, Village Community

Empowerment Service, Karang Taruna, PKK, and WEHASTA. The research method used is a qualitative approach. The focus of the study covers eight aspects of collaborative governance according to DeSeve in Sudarmo (2015). The results of the study indicate the following, **Network Structure** has challenges, namely the imbalance of capacity, especially in youth organizations (Karang Taruna). **Commitment to a Common Purpose** found a phenomenon of decreasing commitment, active participation began to decrease. **Trust among Participants** there is a need to clarify roles, ensure transparency in decision making. **Governance** has obstacles, namely the limited community participation forum. **Access to Authority** in the waste management program still does not have an SOP. **Distribution of Responsibilities** is unclear. **Information Sharing** still needs to be improved so that all parties can obtain accurate information. **Access to Resources** is still limited in terms of funding and adequate skilled workers. **Network Structure** can be improved by involving youth through interesting activities such as educational video competitions. **Commitment to a Common Purpose** in the waste management program can be drawn up in a formal agreement such as an MoU, and provide awards. **Trust Among the Participants** can form a collaborative transparency forum, compile and socialize the roles and responsibilities of each actor. **Governance** can form a Waste Care Citizens Forum. **Access to Authority** can compile an integrated SOP for waste management for all actors. **Distribution of Responsibilities** can compile a role map. **Information Sharing** can build an integrated communication system, such as WhatsApp groups and information boards. **Access to Resources** in waste management programs can regenerate the Waste Bank team and establish a voluntary contribution scheme for residents.

**Keywords:** Community, Waste Management, Governance

## Pendahuluan

Masalah sampah merupakan isu yang semakin penting di berbagai wilayah negara Indonesia, terutama di daerah yang padat penduduknya. Dalam beberapa dekade terakhir, masalah pengelolaan sampah telah menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Unsur seperti rumah, gaya hidup, dan manajemen sampah dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sebagai prioritas dalam pembangunan wilayah.

Di Indonesia, salah satu daerah yang sedang berupaya mengatasi masalah pengelolaan sampah adalah Kabupaten Lamongan, khususnya di Desa Kediren. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bahwa jumlah sampah perhari sekitar 393,18 ton dengan rincian 36,68 ton perhari dari wilayah administrasi perkotaan dan 356,5 ton per hari untuk wilayah non-kota di seluruh Kabupaten Lamongan (Ibrahim, 2020). Sedangkan perhitungan residu sampah dengan menggunakan standart penetapan SNI 3242-2008 terdapat 0,50 kg tiap orang dan per hari yang kemudian dikali

1.493 penduduk Desa Kediren mendapat total 746,5 kg residu sampah yang dihasilkan per hari. Desa ini menghadapi masalah peningkatan volume sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada awalnya Desa Kediren tidak memiliki sistem pengelolaan sampah, hingga tahun 2022 terdapat tim P2MD (Program Pemberdayaan Masyarakat Desa) Himpunan Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan D4 Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya melaksanakan program pengelolaan sampah melalui lima program besar, di antaranya Bank Sampah, TPS 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*) yang diberi nama Bumi Asri, Daur Ulang Sampah Anorganik menjadi Kerajinan, Membuat Kompos dari Sampah Organik, dan Festival Hasta Karya.

Program tersebut tidak hanya bentuk implementasi dari kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, namun juga Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dalam menangani sampah dalam bijaksana. Selain Undang-Undang, ada Peraturan Pemerintah yang berisi tentang aturan persampahan yang berlaku di Indonesia, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Di Kabupaten Lamongan memiliki kebijakan yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah di antaranya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati (PERBUP) Lamongan Nomor 39 Tahun 2018. Sebagai respons terhadap tantangan permasalahan pengelolaan sampah di Desa Kediren, konsep *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) telah dilakukan sebagai pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Konsep ini mengedepankan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada pelaksanaan program pengelolaan sampah di Desa Kediren menggandeng para aktor antara lain: 1) Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lamongan, 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 3) Universitas Negeri Surabaya, 4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 5) Karang Taruna, 6) Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Edukasi Harapan Alam Semesta (WEHASTA), 7) Robbries, dan 8) Pengepul sampah swasta. Oleh karena itu, penting untuk mengamati sejauh mana program pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance* di Desa Kediren sudah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis kolaboratif di Desa Kediren masih terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu menurunnya tingkat partisipasi para aktor, ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait implementasi program

pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance* di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan, dengan fokus pada penerapan *collaborative governance*.

## Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmiah yang disusun untuk mengintegrasikan data menuju tujuan dan manfaat tertentu. Konsep metode penelitian yang diuraikan lebih dalam sebagai eksplorasi teoritis dari berbagai pendekatan dan teknik. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari se-optimal mungkin seorang individu atau kelompok dan kejadian.

Fokus penelitian dapat membantu dalam mempersempit ruang lingkup penelitiannya. Selaras dengan yang disampaikan oleh Spradley dalam Sugiyono (2019) mendefinisikan fokus penelitian kualitatif mengaitkan pemilihan domain tertentu tergantung pada tingkat informasi baru yang relevan untuk dikumpulkan dari konteks sosial. Untuk mencapai tujuan yang tepat dalam penelitian ini, menentukan fokus pada Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative governance dengan aktor yang terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Edukasi Harapan Alam Semesta (WEHASTA), dan pemerintah desa di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Peneliti merujuk pada delapan komponen collaborative governance menurut DeSeve dalam Sudarmo (2015), yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Network Structure (Struktur Jaringan) : Berkaitan dengan struktur jaringan yang terjalin pada pelaksanaan program pengelolaan sampah di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Dalam komponen network structure ini peneliti berfokus pada aktor yang terlibat dalam aktivitas perancangan hingga implementasi program pengelolaan sampah.
2. Commitment to Common Purpose (Komitmen pada Tujuan Bersama) : Dalam komponen commitment to common purpose ini berfokus pada tujuan bersama yang telah disepakati para aktor dalam menjalin komitmen yaitu melaksanakan program pengelolaan sampah untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Peneliti mengamati sejauh mana komitmen yang telah disepakati telah terpenuhi dan bertahan.
3. Trust Among Participants (Kepercayaan Di antara Partisipan) : Dalam komponen kepercayaan di antara partisipan ini peneliti mengamati sikap saling percaya para stakeholder satu-sama lain yang sudah terjalin baik pada hubungan profesional atau sosial dan keyakinan dalam pengelolaan sampah di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan.

4. **Governance (Tata Kelola)** : Dalam komponen tata kelola ini, peneliti mengamati dalam implementasi program pengelolaan sampah dan mempertimbangkan mengenai interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat maupun sebaliknya. Setelah prosedur pengelolaan sampah sudah disepakati di awal dan ditetapkan oleh pemerintah, peneliti mengamati interaksi antara masyarakat dan pemerintah baik daerah maupun desa.
5. **Access to Authority (Akses Terhadap Kewenangan)** : Dalam komponen akses terhadap kewenangan ini, penelitian difokuskan pada tentang tersedianya standar prosedur pengelolaan sampah yang jelas dan dapat diterima secara luas oleh para pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Sehingga kriteria dan prosedur pengelolaan sampah yang diterima masing-masing aktor untuk mengemban tugas mereka sesuai dengan kewenangannya.
6. **Distributive Accountability/Responsibility (Distribusi Tanggung Jawab)** : Dalam komponen distribusi tanggung jawab ini, penelitian berfokus pada implementasi program pengelolaan sampah berbasis collaborative governance yang mengamati pembagian pengambilan keputusan serta tanggung jawab secara merata terhadap semua aktor yang terlibat, respon seluruh aktor dalam mengemban tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan.
7. **Information Sharing (Berbagi Informasi)** : Dalam komponen berbagi informasi ini, peneliti mempertimbangkan kemudahan akses seluruh aktor yang terlibat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar dalam program pengelolaan sampah di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan.
8. **Access to Resources (Akses kepada Sumber Daya)** : Dalam komponen akses kepada sumber daya, peneliti mengamati ketersediaan sumber daya keuangan, sumber daya teknis, dan sumber daya manusia yang ada pada program pengelolaan sampah di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi program pengelolaan sampah berbasis collaborative governance di desa Kediren. Tata kelola kolaboratif memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di Desa Kediren. Masalah sampah yang kompleks memerlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk menemukan solusi yang efisien dan berkelanjutan. Di desa ini, penerapan collaborative governance dapat mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat, pemerintah desa, dan sektor swasta. Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak, tanggung jawab, sumber daya, dan pengetahuan dapat dibagi dengan lebih merata, sehingga program pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan terkoordinasi.

Program Bank Sampah yang diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dalam program pemberdayaan masyarakat desa (P2MD) bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kediren akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menggunakan pendekatan tata kelola collaborative governance dengan menggandeng stakeholder baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Tata kelola ini berperan penting untuk membantu program dalam hal materi maupun non materi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi program pengelolaan sampah dengan pendekatan tata kelola collaborative governance di desa Kediren.

### **1. Network Structure (Struktur Jaringan)**

Struktur jaringan dalam tata kelola kolaboratif memainkan peranan sentral dalam keberhasilan program pengelolaan sampah di Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Secara empiris, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah dan desa, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat dan LSM, menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Struktur jaringan yang terjalin antara aktor-aktor tersebut memfasilitasi pertukaran sumber daya, informasi, dan keahlian, sehingga memperkuat keterlibatan dan komitmen setiap pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan DeSeve dalam Sudarmo (2015) yang menyatakan bahwa jaringan yang kuat memungkinkan terciptanya sinergi yang mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan bersama. Dalam konteks Desa Kediren, peran aktif Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai fasilitator dan pendamping program sangat krusial. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis sampah melalui pendampingan produksi dan pemasaran.

Partisipasi organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK memperlihatkan bahwa struktur sosial lokal sangat berkontribusi dalam pelaksanaan program. Karang Taruna yang mewakili kelompok pemuda dan PKK yang beranggotakan ibu-ibu desa menjadi ujung tombak pelaksanaan di tingkat masyarakat. Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan kendala, terutama terkait kurangnya konsistensi anggota Karang Taruna yang sebagian besar masih berusia muda dan terfragmentasi akibat migrasi ke luar kota. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur jaringan sudah ada, kualitas sumber daya manusia dalam jaringan tersebut perlu diperkuat agar program bisa berjalan lebih berkelanjutan.

Sektor swasta melalui pengepul sampah berperan sebagai penghubung yang mengubah sampah menjadi nilai ekonomi, sehingga program pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi. Keterlibatan NGO seperti WEHASTA menambah dimensi pembelajaran dan penyediaan kebutuhan teknis dalam pengelolaan sampah, menegaskan pentingnya dukungan eksternal dalam tata kelola kolaboratif yang efektif. Namun, meskipun jaringan kolaborasi ini telah berjalan

cukup baik, wawancara dengan masyarakat mengindikasikan adanya kekurangan dalam hal komunikasi dan informasi, seperti kurangnya sosialisasi terkait jadwal operasional bank sampah. Hal ini menandakan bahwa efektivitas jaringan juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan. Dukungan pemerintah desa yang lebih optimal sangat diperlukan untuk menjembatani gap komunikasi ini agar masyarakat dapat lebih aktif dan terinformasi dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat desa sangat bergantung pada struktur jaringan kolaboratif yang inklusif dan terorganisir. Peran aktif pemerintah, partisipasi masyarakat, keterlibatan sektor swasta, dan dukungan organisasi eksternal harus terus dipererat dan didukung dengan kebijakan yang tegas serta pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang lebih besar terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

## **2. *Commitment to Common Purpose* (Komitmen terhadap Tujuan Bersama)**

Komitmen terhadap tujuan bersama merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antar berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Dalam konteks program pengelolaan sampah di Desa Kediren, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesepahaman tujuan bersama yang kuat, yakni menciptakan sistem pengelolaan sampah organik dan anorganik yang efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Temuan ini selaras dengan pandangan DeSeve dalam Sudarmo (2015) yang menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam tata kelola kolaboratif sebagai fondasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Direktur WEHASTA secara tegas mengungkapkan bahwa tujuan utama program ini adalah memastikan kelancaran pengelolaan sampah di Desa Kediren dengan melibatkan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Hal ini mencerminkan adanya kesamaan visi dan misi di antara pemangku kepentingan yang menjadi modal sosial penting dalam membangun kolaborasi yang kuat. Dalam teori collaborative governance menurut DeSeve (dalam Sudarmo, 2015), kesamaan tujuan dan komitmen tersebut merupakan prasyarat agar jaringan kolaborasi dapat berjalan sinergis dan saling mendukung dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi program.

Upaya untuk menjaga komitmen ini juga dilakukan melalui mekanisme formal, seperti penggunaan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta forum diskusi rutin untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kepala Desa Kediren juga mengindikasikan pentingnya kegiatan sosialisasi dan festival sebagai wahana untuk memperkuat komitmen dan

partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep dalam collaborative governance yang menekankan perlunya platform dialog dan forum kolaboratif sebagai medium untuk memperkuat komitmen bersama serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul.

Ketua Karang Taruna dan anggota PKK menjelaskan adanya penurunan komitmen setelah tahun 2023, khususnya setelah keberhasilan memenangkan lomba desa berseri. Fenomena ini mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan konsistensi kolaborasi jangka panjang. Penurunan ini juga diperkuat oleh pandangan masyarakat yang merasakan berkurangnya dukungan dan partisipasi aktif, yang mengindikasikan bahwa komitmen tidak hanya perlu dibangun di awal, tetapi juga harus dipelihara secara berkelanjutan agar program dapat terus berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa teori DeSeve dalam Sudarmo (2015) yang menegaskan pentingnya kontinuitas dan adaptasi dalam kolaborasi sangat relevan untuk mengatasi dinamika dan tantangan tersebut.

Secara keseluruhan, struktur komitmen yang terbentuk di Desa Kediren memperlihatkan gambaran nyata bagaimana kolaborasi multi-pihak berjalan dalam pengelolaan sampah. Meskipun sudah terdapat kesamaan tujuan dan dukungan formal, penurunan komitmen menjadi sinyal perlunya strategi penguatan kapasitas, pemberdayaan aktor lokal, serta pembaruan mekanisme koordinasi yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Peningkatan intensitas komunikasi, monitoring berkala, dan insentif yang berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk menjaga komitmen dan keselarasan tujuan dalam jaringan kolaboratif ini.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Kediren sangat bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan mampu mempertahankan dan memperkuat komitmen bersama mereka melalui pendekatan kolaboratif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan kerangka teori collaborative governance dari DeSeve dalam Sudarmo (2015).

### **3. *Trust Among Participants* (Kepercayaan di antara partisipan)**

Kepercayaan antar partisipan merupakan elemen fundamental dalam membangun hubungan yang efektif dan kolaboratif dalam tata kelola bersama, sebagaimana ditegaskan oleh teori collaborative governance menurut DeSeve dalam Sudarmo (2015). Teori ini menyatakan bahwa kepercayaan menjadi modal sosial yang krusial untuk menciptakan sinergi antar aktor, memperlancar komunikasi, serta memfasilitasi pengambilan keputusan bersama yang responsif dan inklusif. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kepercayaan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Desa Kediren sangat menentukan keberhasilan program kolaboratif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya membangun dan memelihara



kepercayaan dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah seperti sosialisasi, lomba desa, dan pelibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menyampaikan bahwa kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat dibangun dengan menghadirkan program-program yang melibatkan warga secara langsung serta mengangkat program pengelolaan sampah Desa Kediren dalam lomba tingkat daerah. Pendekatan ini konsisten dengan konsep DeSeve dalam Sudarmo (2015) yang menegaskan pentingnya partisipasi aktif sebagai bentuk komitmen sosial yang memperkuat kepercayaan dalam jaringan kolaboratif. Selain itu, peran organisasi masyarakat seperti WEHASTA yang memberikan wawasan teknis tentang pengelolaan sampah, termasuk bank sampah dan pembuatan kompos, turut menambah tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan. Keterlibatan mahasiswa sebagai mediator juga membantu menjembatani komunikasi dan interaksi antara sektor pemerintahan, masyarakat, dan swasta, meskipun hubungan dengan pihak swasta masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya bergantung pada hubungan bilateral, tetapi juga pada dinamika jaringan multi-aktor yang terjalin dalam tata kelola kolaboratif.

Kepercayaan juga terlihat pada komunikasi terbuka yang terus dijaga antara pemerintah dan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa Kediren menekankan bahwa wadah-wadah seperti sosialisasi dan musyawarah desa menjadi medium penting untuk menjaga keyakinan dan dukungan masyarakat. Namun, masih ditemukan tantangan, seperti keberatan warga terhadap peraturan iuran sampah dan kekhawatiran dampak terhadap mata pencaharian tengkulak sampah. Temuan ini menggambarkan realitas kompleksitas pengelolaan sampah yang tidak hanya teknis tetapi juga sosial-ekonomi, yang harus dikelola secara hati-hati dalam rangka mempertahankan kepercayaan bersama.

Kepentingan masyarakat dalam program seperti Bank Sampah sangat tergantung pada kepercayaan mereka terhadap manfaat dan transparansi program tersebut. Pernyataan anggota PKK, Bu Ira, dan beberapa informan masyarakat menegaskan bahwa tanpa kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, program pengelolaan sampah tidak akan berjalan lancar dan sulit meraih keberhasilan. Hal ini menguatkan teori DeSeve dalam Sudarmo (2015) bahwa kepercayaan adalah prasyarat utama bagi keberlangsungan kolaborasi dalam tata kelola bersama.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan merupakan pilar utama dalam mengokohkan kolaborasi pengelolaan sampah di Desa Kediren. Komunikasi yang transparan, pelibatan langsung masyarakat, dan pemahaman bersama menjadi kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam memperkuat hubungan dengan sektor swasta dan menangani resistensi sosial terkait kebijakan iuran sampah. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme komunikasi yang inklusif dan adaptif serta

pembentukan jaringan yang lebih solid sangat diperlukan agar kolaborasi ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan kerangka collaborative governance yang dijelaskan oleh DeSeve dalam Sudarmo (2015).

#### **4. Governance (Tata Kelola)**

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menilai efektivitas pengelolaan sampah di Desa Kediren. Menurut DeSeve dalam Sudarmo (2015), tata kelola yang efektif harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan program. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut di Desa Kediren sudah dilakukan secara beragam, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek partisipasi dan mekanisme komunikasi yang lebih mendalam.

Interaksi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakat dalam program pengelolaan sampah terlihat melalui pemberian ruang partisipasi yang cukup aktif, seperti sosialisasi Bank Sampah, pelatihan pembuatan kompos, serta musyawarah desa yang membahas pengintegrasian program ke dalam peraturan desa. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk menerapkan prinsip partisipasi sebagai wujud tata kelola yang inklusif, yang juga sejalan dengan pandangan DeSeve dalam Sudarmo (2015) bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberlanjutan program kolaboratif. Namun demikian, interaksi antara pemerintah daerah dan desa masih bersifat terbatas dan simbolik, seperti acara pembukaan program, peresmian Bank Sampah, dan festival sebagai penanda akhir program. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamongan menyebut keterbatasan jarak sebagai faktor yang membatasi frekuensi interaksi langsung dengan masyarakat Desa Kediren. Meskipun demikian, kontribusi pemerintah daerah tetap memberikan dampak positif dalam mendukung program, walau perlu peningkatan komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar akuntabilitas dapat terjaga secara optimal.

Peran NGO seperti WEHASTA yang berinteraksi secara tidak langsung melalui mahasiswa UNESA sebagai mediator juga memberikan kontribusi penting berupa bantuan teknis dan material, seperti pelatihan pengelolaan sampah dan penyediaan alat serta bahan pendukung. Hal ini mencerminkan bentuk kolaborasi lintas sektor yang diuraikan dalam teori tata kelola kolaboratif, di mana berbagai pihak dapat berperan sesuai kapasitasnya demi keberhasilan tujuan bersama. Meski sudah terdapat forum seperti musyawarah desa yang diadakan setahun sekali, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan masih dirasakan kurang maksimal. Masyarakat menganggap forum tersebut belum mampu menggali kebutuhan dan aspirasi yang lebih spesifik dan detail terkait pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dialog dan ruang konsultasi yang lebih intensif agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kelola desa.

Keterlibatan masyarakat yang aktif, terutama dalam program Bank Sampah, mulai

dari tahap sosialisasi, peresmian, hingga partisipasi langsung sebagai nasabah, menunjukkan upaya penerapan prinsip partisipasi yang berhasil mendorong kesadaran dan tanggung jawab kolektif. Keterlibatan ini sekaligus menjadi modal sosial penting untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam komunikasi dan frekuensi interaksi, prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah mulai diterapkan di Desa Kediren. Namun, penguatan forum komunikasi dan peningkatan peran aktif masyarakat serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, NGO, dan pihak lain sangat diperlukan agar program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pendekatan tata kelola kolaboratif menurut DeSeve dalam Sudarmo (2015) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan semacam ini bergantung pada sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan.

#### **5. Access to Authority (Akses kepada Kewenangan)**

Indikator Access to Authority atau akses kepada kewenangan menjadi aspek krusial dalam tata kelola kolaboratif, khususnya dalam pengelolaan sampah di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. Dalam konteks collaborative governance yang dikemukakan oleh DeSeve dalam Sudarmo (2015), akses terhadap kewenangan berfungsi sebagai jembatan agar setiap partisipan mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) mendapatkan kesempatan setara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat inisiatif positif, seperti program Bank Sampah yang aktif berjalan, aspek akses kewenangan masih menunjukkan beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kediren dan masyarakat menunjukkan bahwa sampai saat ini, belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur secara menyeluruh pengelolaan sampah di desa tersebut. SOP yang tersedia hanya terbatas pada Bank Sampah, yang penyusunannya dilakukan oleh mahasiswa UNESA dan telah mendapatkan persetujuan pemerintah desa. Namun, dokumentasi resmi terkait SOP ini belum tersebar luas dan tidak tersip dengan baik di masyarakat, yang menandakan kurangnya transparansi dan distribusi informasi. Kondisi ini menjadi indikator bahwa akses masyarakat terhadap kewenangan terkait kebijakan pengelolaan sampah belum optimal. Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Ketua Karang Taruna menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dan NGO dalam penyusunan prosedur pengelolaan sampah masih bersifat ideal, belum terwujud secara maksimal dalam praktik. Ketua Karang Taruna bahkan menyatakan bahwa SOP yang ada tidak diperbarui dan keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dan

implementasinya di lapangan, yang mencerminkan lemahnya akses kewenangan oleh para aktor lokal dalam proses tata kelola.

Para narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan NGO WEHASTA secara konsisten menggarisbawahi pentingnya pemetaan peran, kewenangan, dan kapasitas tiap aktor sejak tahap awal perencanaan. Mereka menekankan bahwa prosedur pengelolaan sampah seharusnya bersifat fleksibel dan partisipatif, tidak hanya bersifat administratif atau top-down, melainkan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan riil di tingkat desa. Pendekatan ini sangat sejalan dengan teori DeSeve dalam Sudarmo (2015) yang menempatkan akses kewenangan sebagai mekanisme kunci untuk membangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi di Desa Kediren menunjukkan bahwa akses kepada kewenangan saat ini masih terbatas pada beberapa aktor dan belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara merata. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan transparansi dokumen kebijakan, penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat, serta penguatan forum dialog dan konsultasi agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam perumusan dan implementasi prosedur pengelolaan sampah.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Desa Kediren, sangat penting untuk mengembangkan prosedur pengelolaan yang inklusif dan adaptif, yang memberikan ruang nyata bagi seluruh aktor untuk mengakses kewenangan dan berpartisipasi secara setara. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam teori collaborative governance oleh DeSeve dalam Sudarmo (2015).

#### **6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Distribusi Tanggung Jawab)**

Dalam kerangka collaborative governance, distribusi tanggung jawab memegang peranan strategis dalam menjamin keterlibatan yang seimbang dan berkeadilan antar aktor. Menurut DeSeve dalam Sudarmo (2015), tata kelola kolaboratif yang efektif mensyaratkan adanya pembagian peran yang proporsional sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak. Tanpa struktur tanggung jawab yang jelas, kolaborasi cenderung timpang dan tidak berkelanjutan. Temuan penelitian di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan, menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif awal dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sistem distribusi tanggung jawab masih belum berjalan secara formal dan terstruktur.

Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembagian tanggung jawab resmi dalam pengelolaan sampah. Program belum berjalan penuh, dan pembagian peran masih bersifat konseptual. Kendati demikian, kedua

institusi ini telah menyusun kerangka pembagian tanggung jawab yang ideal: pemerintah desa sebagai pengatur kebijakan lokal dan penyedia infrastruktur dasar, masyarakat sebagai pelaku utama yang terlibat dalam kegiatan pemilahan dan pengumpulan, serta NGO atau pihak ketiga sebagai pendamping teknis dan penyedia edukasi. Struktur seperti ini sejalan dengan prinsip tata kelola kolaboratif yang menekankan sinergi lintas sektor. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Hasil wawancara dengan masyarakat, termasuk anggota PKK, Karang Taruna, dan tokoh lokal, menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan belum merata. Keputusan program cenderung didominasi oleh kelompok tertentu, seperti pengurus RT atau pengelola inti, sementara sebagian warga merasa hanya menjadi penerima informasi. Ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi tanggung jawab, terutama dalam hal akses terhadap proses deliberatif dan pengaruh terhadap arah kebijakan.

Sesuai dengan teori DeSeve dalam Sudarmo (2015), kolaborasi yang adil bukan hanya soal berbagi tugas secara administratif, tetapi juga menyangkut keterlibatan aktif dalam seluruh siklus kebijakan. Oleh karena itu, pembentukan forum terbuka yang inklusif dan representatif menjadi sangat penting. Forum ini dapat menjadi sarana bagi semua unsur masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berbagi peran, dan ikut serta dalam evaluasi program.

Meskipun demikian, respon dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah menunjukkan potensi yang besar. Kesadaran warga meningkat sejak adanya inisiatif seperti bank sampah dan sosialisasi oleh mahasiswa serta perangkat desa. PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat lokal telah menunjukkan keterlibatan aktif. Namun, tantangan keberlanjutan masih membayangi, terutama karena kurangnya dukungan teknis dan struktural dari pemerintah daerah. Tanpa pendampingan berkelanjutan, semangat partisipatif yang telah tumbuh dapat melemah. Sementara itu, Direktur WEHASTA menyoroti pentingnya membangun pemahaman dan komitmen kolektif sejak awal. Tanpa pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang terbuka, tanggung jawab akan cenderung terpusat dan membebani pihak tertentu. Hal ini dapat melemahkan prinsip *shared responsibility*, yang merupakan inti dari tata kelola kolaboratif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran dan inisiatif awal, distribusi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Desa Kediren masih perlu diperkuat melalui:

- Pembagian peran secara formal dalam bentuk SOP atau peraturan desa.
- Pemetaan aktor dan kapasitas lokal, agar tanggung jawab dibagi sesuai kemampuan.
- Forum musyawarah terbuka yang inklusif, sebagai ruang komunikasi dan pengambilan keputusan bersama.
- Dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah daerah dan NGO secara

konsisten.

Dengan memperkuat struktur distribusi tanggung jawab seperti yang disarankan dalam teori DeSeve dalam Sudarmo (2015), pengelolaan sampah di tingkat desa tidak hanya akan menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih adil dan berkelanjutan.

### **7. Information Sharing (Berbagi Informasi)**

indikator Information Sharing atau berbagi informasi memegang peranan yang sangat krusial dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Kediren, Lamongan. Temuan ini sejalan dengan konsep DESEVE (Desentralisasi, Empowerment, Sharing, Evaluasi, dan Validasi) yang dikemukakan oleh Sudarmo (2015), khususnya dalam aspek Sharing yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan distribusi informasi yang efektif antar pemangku kepentingan dalam tata kelola kolaboratif.

Menurut Sudarmo (2015), keberhasilan pengelolaan sumber daya atau program pembangunan yang melibatkan banyak aktor sangat tergantung pada mekanisme berbagi informasi yang transparan dan inklusif. Dalam konteks Desa Kediren, pola komunikasi yang digunakan, seperti word-of-mouth melalui sound masjid, grup WhatsApp warga, pengumuman keliling, serta surat pemberitahuan, mencerminkan penerapan prinsip sharing tersebut. Media komunikasi yang bervariasi ini memungkinkan informasi program pengelolaan sampah tersebar secara luas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah desa, masyarakat umum, serta lembaga swadaya masyarakat.

Pernyataan Kepala Desa dan warga masyarakat seperti Bu Lita memperkuat bahwa akses terhadap informasi sudah cukup mudah dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian informasi yang ada sudah berjalan sesuai dengan teori DESEVE, di mana partisipasi aktif masyarakat dapat terwujud melalui akses informasi yang memadai. Dalam teori ini, penyebaran informasi yang tepat dan berkelanjutan menjadi landasan utama untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) agar bisa berperan aktif dalam pelaksanaan program. Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya kebutuhan untuk memperluas dan menata akses informasi secara lebih terstruktur agar partisipasi tidak hanya terbatas pada kelompok yang sudah aktif, melainkan juga menjangkau pemuda dan kelompok rentan. Ini sesuai dengan gagasan Sudarmo (2015) yang menekankan pentingnya desentralisasi dan pemberdayaan yang inklusif agar seluruh aktor masyarakat memiliki akses yang setara dan mampu berkontribusi optimal. Penyusunan sistem informasi yang lebih terorganisir dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat, sehingga memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

Peran aktif pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, dalam

menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan langsung juga sesuai dengan prinsip sharing dan empowerment dalam DESEVE. Kegiatan ini menjadi jembatan informasi yang memastikan bahwa pesan mengenai pengelolaan sampah tidak hanya sampai, tetapi juga dipahami oleh masyarakat secara komprehensif. Dengan demikian, peran pemerintah daerah merupakan pendorong utama untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan jaringan kolaboratif antara aktor terkait. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat yang diwujudkan dalam peran sebagai agen perubahan di tingkat RT dan RW juga mencerminkan implementasi prinsip empowerment dan sharing. Direktur WEHASTA dan Ketua Karang Taruna mengindikasikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan bank sampah dan sosialisasi mampu memperlihatkan antusiasme dan kesiapan warga untuk terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan. Ini sejalan dengan teori DESEVE yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang tepat dan peran aktif dalam proses pengambilan keputusan akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam program yang dijalankan.

Keseluruhan temuan ini memperkuat gagasan bahwa penyebaran informasi yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat adalah fondasi utama keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kolaborasi sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan model tata kelola kolaboratif yang dianjurkan dalam DESEVE. Penyampaian informasi yang terbuka, sistematis, dan inklusif tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung bahwa penerapan teori DESEVE, khususnya pada aspek sharing dan empowerment, dapat menjadi kerangka yang efektif dalam mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif di Desa Kediren, Lamongan.

#### **8. Access to Resources (Akses kepada Sumber Daya)**

Akses terhadap berbagai sumber daya muncul sebagai faktor penentu utama yang memengaruhi efektivitas partisipasi para aktor yang terlibat. Temuan ini sejalan dengan konsep DESEVE yang dikembangkan oleh Sudarmo (2015), yang menekankan bahwa keberhasilan suatu program sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang mencakup aspek keuangan, teknis, dan sumber daya manusia. Ketika sumber daya ini dapat diakses secara memadai oleh seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta maka peluang untuk terciptanya kolaborasi yang harmonis dan produktif menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya yang efektif merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam membangun partisipasi yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam teori DESEVE, aspek Desentralisasi dan Empowerment menggarisbawahi pentingnya distribusi sumber daya yang merata agar setiap aktor baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta memiliki kemampuan

untuk berkontribusi secara optimal. Penekanan pada akses sumber daya yang memadai ini tercermin pada wawancara dengan Direktur WEHASTA yang mengingatkan agar aspek pendanaan dipersiapkan sejak tahap perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak sebagai mitra. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan program agar tidak bergantung pada sumber dana tunggal. Demikian pula, informasi dari anggota PKK Desa Kediren menunjukkan bahwa meskipun pendanaan masih berskala terbatas dan bersumber dari hibah, laba BUMDes, serta bantuan awal pemerintah desa, upaya mandiri dalam pengelolaan keuangan sudah mulai dijalankan secara bertahap.

Dalam konteks sumber daya teknis, teori DESEVE menekankan pentingnya fasilitas dan kapasitas teknis yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan program (Sharing). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menekankan perlunya perencanaan menyeluruh untuk aspek teknis seperti peralatan pengolahan sampah, kendaraan angkut, serta pelatihan bagi petugas dan masyarakat. Ini sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan keberadaan bank sampah dengan alat pemilahan dan penimbangan yang cukup memadai, sebagaimana dijelaskan oleh Bu Lita dan Pak Amin. Ketersediaan sumber daya teknis tersebut memberikan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif meskipun masih dalam skala terbatas.

Akses terhadap sumber daya manusia menjadi elemen vital yang tidak kalah penting dalam kerangka DESEVE, khususnya pada aspek Empowerment dan Validasi. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamongan menggarisbawahi bahwa perencanaan yang matang harus mencakup penentuan pihak-pihak yang terlibat mulai dari tingkat desa hingga RT/RW. Ketua Karang Taruna, Mas Niko, menambahkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat sebagian besar aktif dalam pengelolaan bank sampah, khususnya ibu-ibu PKK. Namun, terdapat kekurangan dalam pembaruan tim pengelola selama tiga tahun, yang dapat menghambat dinamika dan efektivitas pengelolaan. Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan motivasi pengelola, sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang dinamis dalam DESEVE. Secara keseluruhan, ketersediaan sumber daya yang mencakup aspek keuangan, teknis, dan manusia harus dikelola secara terstruktur agar tercipta kolaborasi yang seimbang dan produktif antar semua pihak. Keterbatasan sumber daya yang ada saat ini dapat ditanggulangi dengan perencanaan yang lebih matang dan kemitraan lintas sektor yang solid, sehingga program pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menguatkan gagasan Sudarmo (2015) bahwa distribusi sumber daya yang adil dan pemberdayaan kapasitas lokal merupakan fondasi utama keberhasilan dan keberlanjutan program berbasis masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori DESEVE dalam mengelola akses sumber daya untuk memperkuat kolaborasi dan efektivitas program pengelolaan sampah di Desa Kediren. Pendekatan yang terintegrasi dan inklusif terhadap sumber daya menjadi kunci dalam mendorong partisipasi aktif semua aktor dan



memastikan keberlanjutan program secara menyeluruh.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pengelolaan sampah berbasis collaborative governance di Desa Kediren telah memberikan dampak positif melalui kolaborasi berbagai aktor, mekanisme komunikasi yang lebih baik, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti koordinasi yang belum optimal, pembagian tanggung jawab yang belum jelas, keterbatasan sumber daya, serta perlunya penguatan komitmen dan transparansi. Delapan indikator collaborative governance yang dianalisis menunjukkan capaian dan hambatan yang berbeda, dengan komitmen terhadap tujuan bersama dan berbagi informasi menjadi aspek yang memerlukan perhatian khusus agar keberlanjutan program dapat terjaga. Agar program pengelolaan sampah di Desa Kediren dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis, antara lain: penguatan struktur jaringan dengan melibatkan anak muda dan peningkatan kapasitas organisasi; penyusunan kesepakatan formal yang jelas dan pemberian insentif untuk menjaga komitmen; membangun kepercayaan melalui transparansi dan dokumen peran yang jelas; pembentukan forum warga untuk memperkuat tata kelola; standarisasi SOP terpadu untuk memperjelas kewenangan; pembagian tanggung jawab yang proporsional melalui peta peran; serta pengembangan sistem komunikasi yang mudah diakses. Penguatan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ada dan menjadikan program ini sebagai model pengelolaan sampah yang efektif, efisien, serta berkelanjutan, yang dapat direplikasi di wilayah lain.

## **Referensi**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Harmana, D., Wargadinata, E. L., & Nurdin, I. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis *Collaborative governance* Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 247–260.
- Heru Subaris Kasjono. (2016). *Promosi Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan modal sosial*. Yogyakarta Nuha Medika 2016.
- Ibrahim, A. M. (2020, September 25). Lamongan miliki tempat pengelolaan sampah terpadu. *Antara Jatim*, 1. <https://jatim.antaranews.com/berita/418757/lamongan-miliki-tempat-pengelolaan-sampah-terpadu>
- Mulyadi. (2015). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik konsep dan aplikasi proses kebijakan dan pelayanan publik*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D / Sugiyono*. Alfabeta.